



Telaah
Kebijakan



MudaBicara
Youthful Voice, Voice the Future!

Sawit: Sebuah Komoditas atau Kepentingan ?

(Menguji Narasi Politik dan Arah
Kebijakan Nasional)

Sawit: Sebuah Komoditas atau Kepentingan ? (Menguji Narasi Politik dan Arah Kebijakan Nasional)

Penanggungjawab:

- Moch Edward Trias Pahlevi

Peneliti:

- Muhamad Fikri Asy'ari

Editor:

- Muhammad Iqbal Khatami

Penyuntingan dan Tata Letak: Muda Bicara ID

www.mudabicara.id

Dipublikasikan Maret 2026

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kelapa sawit selama ini diposisikan sebagai komoditas strategis nasional dan tampaknya memiliki tempat di hati Presiden, sebab kerap kali ditegaskan dalam berbagai pidato kepresidenannya yang ia tunjukkan sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia. Pemanfaatan sawit pun menimbang pada luasnya wilayah, bahkan hingga memasuki teritori kehutanan, yang acap kali bersinggungan dengan hutan dan masyarakat adat. Diskusi kontemporer terakhir bahkan telah mengubah istilah sawit dalam KBBI menjadi 'pohon' dari tumbuhan atau tanaman. Hal ini tentu menjadi perdebatan di kalangan akademisi, pakar botani, hingga masyarakat.

Selain itu, sawit dimaknai sebagai kontributor terhadap devisa ekspor, penyerapan tenaga kerja, serta stabilitas industri hilir, sehingga sawit termasuk tulang punggung dalam perekonomian negara. Namun, di balik narasi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah sawit dikelola semata sebagai komoditas publik untuk kesejahteraan bersama, atau telah berkembang ke arah kepentingan politik-ekonomi yang lebih sempit?

Tulisan ini menganalisis posisi sawit dalam tiga dimensi utama, yakni ekonomi, tata kelola politik, dan keberlanjutan lingkungan. Beberapa temuan tampaknya menunjukkan ketergantungan struktural terhadap sawit, pemusatan manfaat pada kelompok-kelompok usaha besar, serta lemahnya transparansi kepemilikan dan distribusi nilai tambah. Pada saat yang sama, muncul tekanan global terkait isu deforestasi dan regulasi perdagangan berkelanjutan yang meningkatkan risiko terhadap reputasi dan akses pasar Indonesia.

Keberlanjutan industri sawit tidak hanya dijaga melalui diplomasi defensif atau retorika semata dalam lingkup kedaulatan ekonomi. Melainkan, dibutuhkan reformasi tata kelola untuk transparansi, keadilan distribusi manfaat bagi petani kecil, moratorium ekspansi lahan baru, serta diversifikasi ekonomi nasional. Tanpa arah tersebut, sawit menjadi rentan terhadap kerentanan jangka panjang, baik dalam dimensi ekologis, sosial, atau fiskal.



PENDAHULUAN

Di setiap pidato, Presiden Prabowo sering kali menyebutkan sawit sebagai komoditas yang berharga bagi Indonesia. Terakhir, ia sebutkan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di SICC Sentul pada 2 Februari 2026 yang menegaskan bahwa kelapa sawit adalah tanaman ajaib dan menjadi aset strategis untuk swasembada energi dan pangan di Indonesia. Namun, apabila dilihat ke belakang, sepanjang 2025, Prabowo menunjukkan rasa obsesinya terhadap sawit di berbagai forum.

Sepanjang 2025, Presiden Prabowo berulang kali menegaskan pentingnya sawit dalam berbagai forum.:

Pada Januari, ia menyebut sawit sebagai tanaman hutan asli dan menyatakan rencana perluasan perkebunan untuk meningkatkan ekspor—pernyataan yang memicu kontroversi dan kekhawatiran dari Greenpeace Indonesia terkait potensi ekspansi di kawasan hutan.

April dan Mei, ia kembali menekankan nilai ekonomi strategis sawit serta memperingatkan agar komoditas ini tidak diremehkan.

Desember, dalam HUT ke-61 Partai Golkar, ia menyebut sawit sebagai anugerah Tuhan yang dapat diolah menjadi BBM guna mengurangi ketergantungan impor energi.

Dalam posisi ekspor, sawit memang memiliki peranan penting, di mana 62% dari kebutuhan akan minyak sawit secara global dipasok oleh Indonesia. Pada 2023, Indonesia memproduksi Crude Palm Oil (CPO) sekitar 47 juta ton, palm kernel sekitar 9 juta ton, dan mengekspornya sekitar 27 juta ton. Sawit pun menyumbang devisa yang signifikan sebesar USD 24,01 miliar pada tahun yang sama (BPS, 2024).



Namun, ekspor dan kebutuhan pasokan sawit domestik menyebabkan kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial. Hal ini disebabkan oleh para individu dan korporasi yang memanfaatkan izin-izin usaha dan lahan sawit dari pemerintah untuk mengekstraksi secara berlebih-lebihan, menyebabkan hilangnya atau alih fungsi lahan yang seharusnya untuk hutan menjadi perkebunan sawit. Selain itu, tumpang tindih wilayah antara korporasi dan masyarakat adat pun menjadikan konflik perebutan wilayah.



Selain terjadinya permasalahan di dalam negeri, tekanan terhadap sawit pun muncul dari luar negeri, seperti Uni Eropa yang mendorong kebijakan lingkungan dalam Renewable Energy Directive (RED) dan menyusun resolusi tentang palm oil and deforestation of rainforest. Kebijakan ini mengatakan bahwa minyak sawit tidak ramah lingkungan karena faktor seperti deforestasi di Indonesia (Kamilah et al., 2024).

Hal yang berkebalikan, pada devisa, sawit menghasilkan nilai surplus pada neraca perdagangan Indonesia. Pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan surplus sebesar Rp 508 triliun dari produk sawit dan biodiesel sawit (BPDP, 2025). Kontribusi ini tentu memperkuat posisi sawit sebagai peran sentral dalam ekspor nonmigas. Namun, ketergantungan pada satu komoditas menyimpan bahaya struktural, sebab berbagai isu keberlanjutan sedang digaungkan di dunia dan dapat menjadi penghambat perdagangan sawit. Oleh karena itu, perlunya diversifikasi dan penguatan tata kelola jangka panjang.



SAWIT SEBAGAI PERAN KOMODITAS STRATEGIS

Sebagai industri penting di Indonesia, berdasarkan Outlook Industri Sawit Indonesia 2026 oleh Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), nilai ekonomi sawit mencapai sekitar Rp1,433 triliun atau 6,47% terhadap total PDB nasional. Kontribusi terbesarnya datang dari sektor industri pengolahan yang mencapai Rp970 triliun atau 4,38% terhadap total PDB. Menjadikan sawit sebagai tanaman yang sangat bernilai.

Besarnya nilai ekonomi berkilindan dengan jumlah tenaga pekerja yang terserap dalam industri sawit. Menurut Kementerian Pertanian, industri sawit menyerap sekitar 16,5 juta tenaga kerja, yang terdiri dari:

● **9,7 juta tenaga kerja langsung (petani dan karyawan perusahaan)**

● **8 juta tenaga kerja tak langsung.**

PDB dan penyerapan tenaga menunjukkan bahwa sawit masih menjadi penopang stabilitas ekonomi Indonesia. Ketergantungan pada sawit terlihat dari konsumsi minyak goreng yang menjadi bagian penting dalam pola makan masyarakat. Harga minyak goreng sangat dipengaruhi oleh pasar CPO domestik dan global. Meskipun Indonesia produsen terbesar CPO, harga tetap dipengaruhi oleh dinamika pasar global.

Untuk menjaga stabilitas harga domestik, pemerintah mengeluarkan kebijakan bea keluar, pungutan ekspor, DMO, dan DPO. Bea keluar adalah pajak untuk melindungi stabilitas harga domestik, sementara pungutan ekspor mendanai subsidi biodiesel. DMO dan DPO diterapkan sejak 2022 untuk mengatasi krisis minyak goreng, dengan HET ditetapkan Rp15.700 per liter.

Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan global, seperti regulasi pembatasan sawit di Uni Eropa. Melalui diplomasi ekonomi dan CPOPC, Indonesia berhasil mempengaruhi kebijakan Uni Eropa, termasuk melindungi petani kecil dan membuka dialog.

DIBALIK SAWIT, TERDAPAT KEPENTINGAN POLITIK-EKONOMI

Dalam laporan Walhi Indonesia bersama Auriga (2022), kepemilikan lahan untuk pemanfaatan sawit didominasi oleh korporasi besar dalam perubahan kawasan hutan menjadi peruntukan non-kehutanan (atau disebut pelepasan kawasan hutan). Hingga Juni 2022, pelepasan hutan mencapai 8 juta hektare dengan berbagai pemanfaatan untuk perkebunan (sawit, kakao, dan lainnya), transmigrasi, perluasan kota, pembangunan bandara, dan sebagainya.

Namun, pembangunan perkebunan sawit tampaknya memiliki porsi terbesar dalam pelepasan kawasan hutan;

- **Tercatat seluas 6 juta hektare menjadi perkebunan, atau 71%-nya merupakan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan.**
- **Di mana 29% daripada korporasi memegang sepenuhnya pelepasan kawasan hutan yang dijadikan kebun sawit. PTPN menjadi pemegang terbesar seluas 500 ribu hektare lebih.**

- Penguasaan lahan sawit lewat HGU umumnya dimiliki korporasi besar, karena IUP membutuhkan lahan di atas 25 hektare.
- Relasi politik-bisnis mempengaruhi penguasaan sawit, dengan lobi untuk mengamankan konsesi dan izin usaha.
- Pola ini terlihat di Pemilu 2019 dan 2024, di mana pengusaha ekstraktif terlibat dalam kemenangan kandidat.
- Minimnya pelaporan penerima manfaat memungkinkan praktik pinjam nama, membebankan beban ekologis dan konflik pada masyarakat lokal.
- **Sawit menjadi medium konsolidasi kekuasaan elit politik, tantangan besar bagi Indonesia untuk menghindari oligarki sumber daya yang merugikan keadilan sosial dan keberlanjutan. Tata kelola sawit harus lebih transparan dan terukur untuk pemerataan, menghindari deforestasi dan konflik agraria.**



SAWIT, LINGKUNGAN, DAN KEADILAN SOSIAL

Di tengah kongkalikong politik-bisnis sawit, telah terjadi ekspansi perkebunan sawit yang tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi ekologis dan sosial yang kompleks. Berdasarkan data TreeMap, perluasan sawit tahun 2023 mengonversi sekitar 30.000 hektare hutan, naik 36% dibandingkan dengan 2022. Meski meningkat, angka ini masih jauh lebih rendah dibanding 2012, ketika ekspansi sawit menyebabkan hilangnya sekitar 227.000 hektare hutan di Indonesia (Oktaviano, 2024).

Selain ancaman terhadap biodiversitas, konflik agraria pun ikut muncul. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), tercatat :

108 konflik di sektor sawit, dengan 88 kasus terjadi di perkebunan dan industrinya.

Konflik ini diakibatkan oleh penggusuran dan perampasan tanah masyarakat oleh operasi perusahaan perkebunan karena tumpang tindihnya izin-izin yang diberikan oleh pemerintah. Represi aparat pun tidak terhindari.

- Untuk memoles citra, Pemerintah mendorong kebijakan keberlanjutan sawit, seperti ISPO, untuk memastikan produksi ramah lingkungan dan tanpa membuka lahan baru. Namun, kurang dari 1% kebun yang memiliki sertifikat ISPO.
- Pekebun kecil dan pengepul tidak diatur, menyebabkan sawit dari hutan tetap diperjualbelikan, sementara korporasi besar lebih mudah mengakses pasar internasional.
- Kebijakan sawit harus mengutamakan dimensi lingkungan dan keadilan sosial, dengan fokus pada pengurangan kerusakan ekologis, hak masyarakat lokal, dan akses ekonomi yang inklusif.



Kesimpulan

Sawit tampaknya memiliki peran sentral dalam ekonomi di Indonesia, mengingat kontribusinya di dalam domestik yang sangat dibutuhkan dalam pemenuhan minyak goreng dan devisa yang dihasilkan sangat tinggi bagi Indonesia. Namun, industri sawit di Indonesia tidak sekadar komoditas semata yang dijual karena bernilai atau memenuhi kebutuhan domestik semata, melainkan menjadi medium bagi para elit politik untuk terus mendapatkan kepentingannya. Hal ini tercermin dalam Pemilu 2019 dan 2024, di mana sawit menjadi salah satu jalan melanggengkan kekuasaan jabatan politik.

Menjadi tantangan apabila komoditas sudah termasuk campur tangan politik kepentingan, akan sulit untuk diatur secara regulasi, sebab para pemain politik-bisnis akan terus merongrong dalam parlemen untuk menjauhi kebijakan yang mengganggu usahanya. Pada akhirnya, ekologi dan masyarakat menjadi korban karena kehampaan kebijakan dalam menyelesaikan pembagian wilayah dan ancaman terhadap biodiversitas pada hutan dan gambut.

Oleh karena itu, diperlukan keberanian peran eksekutif dan legislatif dalam pengetatan regulasi, transparansi rantai pasok, dan perlindungan hak masyarakat pada industri sawit.



Rekomendasi Kebijakan

Sebagai industri tulang punggung nasional, industri sawit memang memiliki sisi positif dan negatif dalam pengelolaannya, dengan demikian perlunya beberapa cara strategi untuk meminimalisir sisi negatif untuk terciptanya kesetaraan ekonomi di masyarakat dan terhidarnya kerusakan ekologis, seperti:

- Mengaudit dan meningkatkan transparansi rantai pasok sawit nasional dengan mewajibkan pelaporan terbuka terkait kepemilikan lahan, produksi dan distribusi untuk mencegah tumpang tindih dan konflik kepentingan.
- Memperkuat distribusi manfaat pada petani kecil melalui akses pembiayaan, pemudahan sertifikasi, dan kepastian harga di pasaran.
- Mengutamakan intensifikasi dan produktivitas lahan eksisting daripada pembukaan hutan baru dengan memoratorium.
- Diversifikasi ekspor dan hilirisasi berkelanjutan, dengan begitu Indonesia dapat memperluas portofolio komoditasnya yang tidak hanya bergantung pada sawit, dan mendorong industri turunan sawit bernilai tambah.
- Mewajibkan transparansi afiliasi pejabat publik dengan sektor industri sawit dan memperkuat pengawasan independen, dengan begitu konflik kepentingan Politik-Bisnis dapat terhindar





REFERENSI

- Atikah, P. 2025. Alam tidak salah, biang keladi banjir Sumatra sebenarnya adalah pemburu rente dan oligarki. The Conversation. <https://theconversation.com/alam-tidak-salah-biang-keladi-banjir-sumatra-sebenarnya-adalah-pemburu-rente-dan-oligarki-271393#:~:text=Pemburu%20rente%20industri%20sawit&text=Benturan%20ini%20terjadi%20di%20banyak,sosial%20yang%20ditimbulkan%20industri%20ini>.
- BPDP. 2025. Kelapa sawit sebagai pahlawan devisa Indonesia. [https://www.bpdp.or.id/kelapa-sawit-sebagai-pahlawan-devisa-indonesia#:~:text=Total%20kontribusi%20industri%20sawit%20baik,masyarakat%20\(PASPI%2C%202024\)](https://www.bpdp.or.id/kelapa-sawit-sebagai-pahlawan-devisa-indonesia#:~:text=Total%20kontribusi%20industri%20sawit%20baik,masyarakat%20(PASPI%2C%202024)).
- BPS. 2024. Statistik kelapa sawit Indonesia (Vol. 17)
- Eliando, J.I., Elistania, Permadi, A., Nadeak, N. 2025. Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Kepemimpinan CPOPC dalam Menentang Regulasi Pembatasan Sawit oleh EU Green Deal pada Periode 2020-2025. Balcony Vol.9 No.1
- FWI. 2025. Mengapa Perkebunan Sawit Disebut Merusak Lingkungan? <https://fwi.or.id/mengapa-perkebunan-sawit-disebut-merusak-lingkungan/>
- Kamilah, L.N., Azmi, A.N., Lazuardi, A. 2024. Dampak Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa terhadap Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Periode 2021–2022. Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations. Vol. 1 No.2: 103-114
- KPA. 2025. Ekspansi lahan sawit berisiko konflik agraria. <https://www.kpa.or.id/2025/01/ekspansi-lahan-sawit-berisiko-konflik-agraria/>
- Menteri Perdagangan RI. 2025. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 2396 Tahun 2025. Jakarta: Menteri Perdagangan RI
- Mustika, P.P. 2026. Tahun 2026, saatnya membuka mata dari cinta yang membutakan bernama kelapa sawit. <https://www.kompas.id/artikel/tahun-2026-saatnya-membuka-mata-dari-cinta-yang-mebutakan-bernama-sawit>
- Oktavianto, P. 2024. Deforestasi akibat kelapa sawit kembali naik. <https://www.forestdigest.com/detail/2519/deforestasi-perkebunan-sawit#:~:text=Dari%20pengamatan%20TreeMap%2C%20tahun%20lalu,habisnya%20227.000%20hektare%20hutan%20Indonesia.&text=Kenaikan%20deforestasi%20terjadi%20di%20rawa,sawit%20di%202022%20dan%202023>.
- Pane, S.G., Santika, I., Nasution, M.M., Balqis, P. 2025. Analisis Komprehensif Dinamika Harga, Kebijakan, dan Rantai Pasok Minyak Goreng di Indonesia: Studi Kasus Fenomena Kelangkaan dan Panic Buying di Medan Denai. Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Vol.16 No.7
- Saleh, S. & Honey, S.U. 2024. Memastikan Kesiapan Indonesia Menjawab Tantangan Pasar Komoditas Sawit Dunia. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/memastikan-kesiapan-indonesia-menjawab-tantangan-pasar-komoditas-sawit-dunia>
- Sipayung, T. 2023. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) serta Alternatif Kebijakan untuk Stabilitas Minyak Goreng Domestik. Diseminasi Policy Brief: Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.
- WALHI & Auriga Nusantara. 2022. Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi. Jakarta: WALHI & Auriga
-